

**AKUNTABILITAS DAN TINGKAT KORUPSI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN
KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

LIA PRAMESTI
NIM. 12030115120059

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Lia Pramesti
Nomor Induk Mahasiswa : 12030115120059
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Usulan Penelitian Skripsi : **AKUNTABILITAS DAN TINGKAT
KORUPSI PADA PEMERINTAH
KABUPATEN DAN KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH**
Dosen Pembimbing : Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt., CA.

Semarang, 4 Februari 2019

Dosen Pembimbing,



Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt., CA.

NIP. 19741222 200012 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Lia Pramesti
Nomor Induk Mahasiswa : 12030115120059
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Usulan Penelitian Skripsi : **AKUNTABILITAS DAN TINGKAT
KORUPSI PADA PEMERINTAH
KABUPATEN DAN KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH**


Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 21 Februari 2019

Tim Penguji

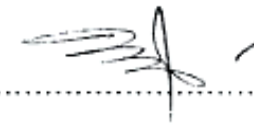
1. Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt., CA


(.....)

2. Puji Harto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D


(.....)

3. Andri Prastiwi M.Si., Akt.


(.....)

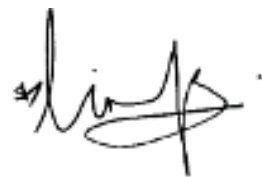
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Lia Pramesti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 4 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,



Lia Pramesti

NIM : 12030115120059

ABSTRACT

Background of this research issue is a corruption event that happened in developing countries continuously increasing and lack of role of government audit institutions in reducing corruption. The purpose of this research is to provide empirical evidence of accountability on curbing corruption in district and city government in Central Java Provincial. The components of accountability observed are (1) audit findings positively affect the curbing of corruption of district and city government in Central Java Provincial, (2) and audit opinions negatively affect the curbing of corruption of district and city government in Central Java Provincial.

The method used in this research is quantitative approach. The data used are secondary data from all district and city government in Central Java Provincial from 2014-2017. The data are analyzed using multiple linier regression analysis method.

The research result shows that audit findings has positive significant effect on corruption and audit opinion has negative significant effect on corruption in provincial governments in Indonesia.

Keyword: Accountability, audit findings, audit results, corruption.

ABSTRAK

Latar belakang masalah penelitian ini adalah peristiwa korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang yang terus meningkat dan kurangnya peran lembaga audit pemerintah dalam mengurangi korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang akuntabilitas dalam memberantas korupsi di pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Komponen akuntabilitas yang diamati adalah (1) temuan audit berpengaruh positif terhadap pemberantasan korupsi pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, (2) dan opini audit berdampak negatif terhadap pembatasan korupsi pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari semua pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dari 2014-2017. Data dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh positif signifikan terhadap korupsi dan opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia.

Kata kunci: Akuntabilitas, temuan audit, hasil audit, korupsi.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah Ayat 5)

Kadang kita harus tahu sampai manakah kita bisa memperjuangkan sesuatu,

Sampai mana kita harus berani menerima mana yang harus diperjuangkan,

Mana yang harus dilepaskan dan diikhhlaskan.

Menyerah bukan berarti putus asa,

Tapi bisa berarti memulai sesuatu yang baru,

Seperti pergantian hari dimana Matahari akan kembali bersinar menggantikan

malam – Matahari ½ lingkaran.

“Teruslah mencoba hingga kau dapatkan yang kau mau”

Saya persembahkan skripsi kepada :

Bapak, Mamah, Mae, Kakung, Bulek, dan Om tercinta
yang begitu banyak memberikan doa dan dukungan tak terhingga.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“AKUNTABILITAS DAN TINGKAT KORUPSI PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH”** dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Sularso dan Ibu Munarti, Kakek dan Nenek tercinta Bapak Kasno dan Ibu Suharti, yang selalu memberikan doa dan dukungan, kasih sayang dan cinta, serta nasehat sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan sarjana.
2. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Fuad S.E.T., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt., CA selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Puji Harto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis selama perwalian.
6. Segenap Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pelayanan yang baik selama proses perkuliahan.

7. Teman segalanya Finky Ariandi yang selalu memberikan dukungan, waktu dan pikirannya selama masa belajar semoga kita selalu saling memberikan semangat.
8. Teman – teman seperbimbingan, teman-teman KKN Tematik Undip Kelompok Tanirama Desa Kaliprau Kabupaten Pemalang, Keluarga Besar Akuntansi Undip 2015, dan Keluarga Bidang Kesejahteraan Mahasiswa BEM FEB Undip 2018, terimakasih banyak atas cerita, kenangan, dan kebersamaannya.
9. Keluarga Biku-Biku yang ide dan bimbingannya sangat cemerlang. Semoga Mas Adit, Mas Dwi, Mba Jeje diberi kelancaran dalam bekerja. *Programmer* andalanku Cahyo dan Roihan terimakasih sudah menemani Biku-Biku, Mei adalah waktunya untuk kita reuni di Gedung Soedharto.
10. Pengajian Fiktif yang selalu ada hingga sekarang, Ria, Syanas, Era, Vina, dan Regita semoga kita menjadi sahabat hingga surga.
11. Teman penelitian Desca dan Sita yang sangat supportif, dan cerdas. Kalian adalah temanku berfikir, semangat terus hingga akhir.
12. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan penulis agar menjadi karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 Februari 2019

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
1.4 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	15
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	15
2.1.1 Teori Klitgaard (<i>Klitgaard Theory</i>)	15
2.1.2 Tingkat Korupsi	17
2.1.3 Korupsi.....	19
2.1.4 Akuntabilitas dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	21
2.1.5 Penelitian Terdahulu	24
2.2 Kerangka Pemikiran	30
2.3 Hipotesis	31

2.3.1	Temuan audit dan tingkat korupsi.....	31
2.3.2	Hasil audit (opini auditor) dan tingkat korupsi	33
BAB III	34
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	34
3.1.1	Variabel Penelitian	34
3.1.2	Definisi Operasional Variabel.....	35
3.2	Sampel dan Populasi	39
3.3	Jenis dan Sumber Data	40
3.4	Metode Pengumpulan Data	40
3.5	Metode Analisis.....	41
3.5.1	Statistik Deskriptif	41
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	42
3.5.3	Uji Hipotesis	44
BAB IV	47
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	47
4.2	Analisis Data	49
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	49
4.2.2	Analisis Regresi Berganda (<i>Multiple Regression Analysis</i>).....	55
4.2.3	Hasil Uji Asumsi Klasik	56
4.2.4	Hasil Uji Hipotesis	64
4.3	Interpretasi Hasil	68
4.3.1	Pengaruh AUIRR (temuan audit) terhadap CORRUPT (tingkat korupsi) 68	
4.3.2	Pengaruh AUOPI (opini audit) terhadap CORRUPT (tingkat korupsi) 69	
4.3.3	Pengaruh GOVSIZE (Ukuran pemerintahan) sebagai variabel kontrol terhadap CORRUPT (Tingkat Korupsi).....	70
BAB V	72
5.1	Kesimpulan.....	72

5.2	Keterbatasan Penelitian	73
5.3	Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	75
	LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian yang dilakukan terdahulu	25
Tabel 4.1 Seleksi sampel penelitian	48
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	49
Tabel 4.3 Jumlah Temuan Audit di Provinsi Jawa Tengah	50
Tabel 4.4 Persentase Opini Audit Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah	51
Tabel 4.5 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kasus Korupsi Terbanyak Perkapita Tahun 2014.....	53
Tabel 4.6 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kasus Korupsi Terbanyak Perkapita Tahun 2015.....	53
Tabel 4.7 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kasus Korupsi Terbanyak Perkapita Tahun 2016.....	54
Tabel 4.8 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kasus Korupsi Terbanyak Perkapita Tahun 2017.....	54
Tabel 4.9 Hasil Uji One Sample Kolmogorov Smirnov	59
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas	60
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas – dengan Uji Glejser	61
Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi – dengan Durbin Watson test.....	63
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	64
Tabel 4.14 Hasil Uji F – Signifikansi Simultan	65
Tabel 4.15 Hasil Uji T – Signifikansi Parameter Individual atau Uji T	66
Tabel 4.16 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Korupsi yang Terjadi di Lembaga Pemerintahan	4
Gambar 1.2 Kasus Korupsi Tahun 2017 Berdasarkan Lembaga (5 Terbanyak)	5
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas – dengan Grafik Histogram.....	56
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas – dengan Grafik Normal Probability Plot	58
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas – dengan Grafik Scatterplot	60

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A SURAT IJIN PENELITIAN	80
LAMPIRAN B DAFTAR SAMPEL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH.....	81
LAMPIRAN C TABULASI DATA PENELITIAN	84
LAMPIRAN D HASIL OUTPUT SPSS	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi sepertinya sudah menjadi masalah yang wajib ada dalam sebuah negara yang sedang berkembang (Olken, 2007). Korupsi memang menjalar dari akar hingga menjadi tunas yang segera bertumbuh di kemudian hari. Hal-hal kecil dimanfaatkan oleh pemegang kekuasaan untuk melakukan kecurangan khususnya korupsi. Begitu pula Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari kasus korupsi (Prabowo, 2016). Meskipun langkah-langkah pemerintah dalam mengurangi terjadinya kasus korupsi di Indonesia patut diperhitungkan seperti melakukan penyempurnaan dalam hal aturan yang berlaku, menegakkan keadilan, dan tidak pandang bulu dalam mengadili kasus korupsi (Henderson & Kuncoro, 2011). Namun, kenyataannya usaha pemerintah harus terus dilakukan secara maksimal. Seperti pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa saking jahatnya sifat Korupsi ternyata mampu melumpuhkan tulang-tulang perekonomian negara, mencoreng citra pemerintah di mata rakyat, dan memiskinkan negara (Deny, 2018). Pada tahun 1998 reformasi menjadi tonggak awal bagi Indonesia untuk merubah sistem pemerintahannya menjadi lebih demokratis dengan mengemban amanah agar semua masyarakat Indonesia merasakan kesetaraan dalam kesejahteraan, tetapi ekspektasi pemerintah saat itu terlalu berlebihan

sehingga hanya harapan yang ada namun tidak terdapat solusi nyata (Sherlock, 2002).

Otonomi daerah adalah anak dari sejarah reformasi yang dicetuskan oleh pemerintah pusat dan hingga saat ini diimplementasikan oleh seluruh pemerintah daerah di nusantara. Tahun 1999 pemerintah berupaya mengeluarkan kebijakan mengenai pemerintahan daerah berupa undang-undang dengan nomor 22 bahwa pelaksanaan otonomi daerah adalah harapan-harapan rakyat untuk menghidupkan atmosfer demokrasi pemerintah, pelaksanaan kewajiban oleh pemerintah untuk rakyat, serta layanan di seluruh aspek yang selalu meningkat demi kesejahteraan umat maka pemerintah daerah diberikan otonomi untuk mewujudkan tujuannya. Selain itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22/1999 juga menyebutkan bahwa masyarakat perlu disejahterakan dalam hal ini menjadi tanggung jawab yang dipikul oleh pemerintah daerah demi membangun komunikasi yang harmonis dengan pemerintah pusat dan seluruh pihak dalam rangka mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh. Tetapi, ekspektasi pemerintah saat itu terlalu berlebihan sehingga hanya harapan yang ada namun tidak terdapat solusi nyata (Sherlock, 2002).

Komunitas Internasional yang memiliki fokus kepada korupsi di seluruh dunia yaitu *Transparency International* selama ini memberikan kritikan atas penyelenggaraan pemerintah salah satunya Indonesia. Negara-negara yang memiliki problematika kecurangan seperti korupsi dalam sektor pemerintahan

atau publiknya akan diperingkat oleh *Transparency International*. Indonesia di mata *Transparency International Indonesia* pada tahun 2017 termasuk dalam peringkat terbawah dalam hal korupsi, dan mendapat predikat dari negara yang paling korupsi khususnya di wilayah Negara Asia-Pasifik (Muliana, 2017) . Indonesia masih bertahan dalam zona merah selama 5 tahun terakhir seperti yang dikatakan oleh TII. Banyak materi yang hilang dan kepercayaan masyarakat yang pupus akibat ulah para koruptor yang selama dekade terakhir telah menghilangkan uang negara sebesar Rp 205 triliun (Ant, 2016). Dengan semua ini sangat mungkin Indonesia mendapatkan julukan sebagai salah satu negara paling korupsi di dunia (Prabowo, 2016).

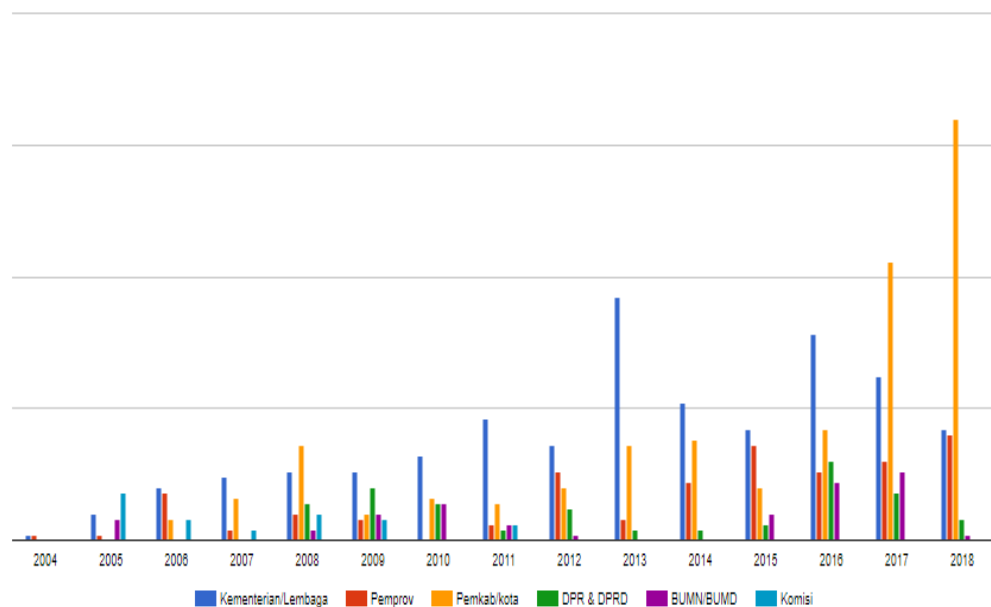
Data *Transparency International Indonesia* tahun 2017 menyatakan Indonesia berada di posisi 96 dari 180 negara dengan perolehan nilai 37, nilai indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan lembaga tersebut mempunyai skala 0 sampai 100, dimana 100 menunjukkan tingkat korupsi terendah, dan 0 menunjukkan tingkat tertinggi negara tersebut dalam korupsi (Transparency International, 2017). Nilai ini tetap dari tahun sebelumnya yang mengharuskan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat bersikeras untuk meningkatkan usaha dalam hal pemberantasan korupsi (Iskandar, 2018).

Pemerintah telah mengupayakan tata kelola yang baik serta desentralisasi berupa otonomi daerah di seluruh Indonesia, namun kenyataannya hal ini dijadikan ladang korupsi bagi oknum-oknum di pemerintah daerah (Maulani, 2010).

Desentralisasi seharusnya menjadi langkah untuk mencapai *good governance*, karena merupakan usaha untuk mencapai kemandirian, keefektifan, serta akuntabilitas pemerintahnya. Tetapi, hal ini dimanfaatkan untuk melakukan tindakan keji yaitu korupsi (Lessmann & Markwardt, 2010). Banyak pendapat yang mendukung bahwa otonomi daerah berkewajiban untuk membangun daerah, seiring berjalannya waktu menurut peneliti Donal Fariz ternyata penerapannya mengakibatkan korupsi yang menjamur seperti yang dilakukan oleh Bupati maupun Walikota di kalangan pemerintah daerah (Wardah, 2013).

Gambar 1.1

Jumlah Kasus Korupsi yang Terjadi di Lembaga Pemerintahan



Banyak sekali para aparatur sipil negara yang bekerja di pemerintahan menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan korupsi. Terlihat dari Gambar 1.1 bahwa pelakunya terkadang adalah pemimpinnya sendiri yaitu Gubernur, Walikota, Bupati hingga Kepala Desa. Kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa wewenang dan materi ternyata membuat aparatur pemerintah daerah terdoda untuk memicu tindakan korupsi (Wardah, 2013). Beberapa lembaga pemerintahan pun tak luput dari tindakan korupsi seperti pada Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Kota, DPR dan BUMN.

Gambar 1.2

Kasus Korupsi Tahun 2017 Berdasarkan Lembaga (5 Terbanyak)



Gambar 1.2 bersumber dari Laporan tren yang dikeluarkan oleh *Indonesia Corruption Watch* tahun 2017 menyatakan bahwa kasus korupsi tertinggi terjadi di lembaga pemerintah daerah kabupaten atau kota sebanyak 222 peristiwa, 106 kasus terjadi pada pemerintah desa, 45 lagi di pemerintah kota dengan total kerugian negara sebanyak Rp 1,362 triliun dengan presentase 89% dari total kasus korupsi yang terjadi di pemerintah pusat (Indonesia Corruption Watch, 2017). ICW juga menyatakan bahwa kepala daerah yang terjangkit korupsi sebanyak 30 tersangka, sedangkan kepala desa sebanyak 102 tersangka, dan aparatur desa sebanyak 38 tersangka (Indonesia Corruption Watch, 2017).

Pemerintah daerah menyelesaikan urusan keuangan sektor publiknya secara mandiri, hal inilah yang menjadi lahan yang subur bagi aparatur untuk melakukan tindakan penyelewengan yang merugikan materi negara. Adanya urusan keuangan pemerintah daerah seperti dalam sektor pengelolaan asset nasional, penganggaran, pengadaan, serta perpajakan membuat semua pihak yang berperan dalam urusan keuangan ingin mendapatkan keuntungan atau manfaat untuk pembiayaan pribadi dengan cara yang kotor (Liu & Lin, 2012). Banyak sektor seperti perusahaan swasta, organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat namun sebagian besar korupsi terjadi di lingkungan pemerintahan (Klitgaard, 1997).

Salah satu Provinsi yang mendapatkan kasus terbanyak terjadinya kasus korupsi adalah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017 menurut Laporan Tren

yang dikeluarkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (2017) di Provinsi Jawa Tengah telah terjadi 29 kasus korupsi dengan kerugian sebesar Rp 40,3 Miliar berada di posisi kelima. Provinsi Jawa Timur menduduki posisi pertama dengan jumlah kasus korupsi yang terjadi sebanyak 68 kasus, disusul Provinsi Jawa Barat 42 kasus, Provinsi Sumatera Utara 40 kasus, dan 34 kasus korupsi terjadi di tingkat nasional atau pada Pemerintahan Pusat.

Sedangkan pada tahun 2018 Provinsi Jawa Tengah menurut Laporan Tren *Indonesia Corruption Watch* (2018) mengalami kenaikan peringkat dimana hal itu artinya semakin banyak kasus korupsi yang terjadi pada pemerintah provinsi tersebut. Provinsi Jawa Tengah mendapatkan peringkat kedua terbanyak dengan jumlah kasus korupsi yang terjadi yaitu 36 kasus dengan jumlah tersangka 65 orang dan kerugian negara sebesar Rp 152,9 Miliar.

Menurut Laporan Tren *Indonesia Corruption Watch* (2017) kasus korupsi tahun 2017 berdasarkan modus terbanyak disebabkan karena penyalahgunaan anggaran dengan total 154 kasus dan nilai kerugian negara Rp 1,2 Triliun. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa sektor terbanyak terjadinya kasus korupsi adalah pada sektor anggaran desa yang merugikan negara hingga Rp 39,3 miliar. Selain itu, pada Provinsi Jawa Tengah lewat pernyataan Ganjar Pranowo saat menghadiri Seminar Regional Dinamikan dan Problematika Tata Kelola Desa menyebutkan dana desa masih rawan disalahgunakan di sejumlah desa.

Setidaknya pada tahun 2017 sudah ada 11 kasus penyalahgunaan dana desa dalam proses hukum di Jawa Tengah (Purbaya, 2017).

Penyebab adanya praktik korupsi pasti diakibatkan oleh banyak hal yang mendukung atau mendorong seseorang untuk melakukan penyelewengan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau satu kelompok pasti akan membentuk monopoli yang berkaitan dengan kepentingan orang tersebut, kemudian kekuasaan tersebut dimanfaatkan untuk membuat kebijaksanaan atau peraturan yang mendukung untuk mewujudkan tujuan seseorang atau sekelompok tertentu. Hal inilah yang mengakibatkan menjamurnya praktik korupsi, karena adanya pemanfaatan kekuasaan, monopoli kebijaksanaan, serta akuntabilitas yang tidak kuat (Klitgaard, 1997). Pemerintah yang memiliki akuntabilitas yang lebih baik akan mengurangi terjadinya tindakan korupsi (Shah, 2007). Sistem yang ada di pemerintahan dapat diperbaiki sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai strategi yang diharapkan mampu memberantas korupsi (Afriyanti, Sabanu, & Noor, 2015).

Untuk menyelesaikan suatu masalah, banyak hal yang dibuat untuk mengurangi bahkan mencegah terulangnya peristiwa tersebut. Lembaga-lembaga di Indonesia seperti BPK, BPKP, Inspektorat, dan KPK dibangun sebagai upaya penindakan korupsi seperti lembaga audit yang dibentuk sebagai pemeriksa untuk menangkis terjadinya ketidakefisienan dan penyalahgunaan dalam pemanfaatan sumber daya organisasi (Dwiputrianti, 2008). Jika pengawasan dalam

pemerintahan lemah serta tata kelola yang buruk maka timbul tindakan korupsi yang disebabkan karena sumber daya publik yang dimiliki disalahgunakan oleh oknum tertentu (Olken, 2007). Dalam sebuah pemerintahan diperlukan adanya pemeriksaan yang mendalam yaitu menerapkan fungsi audit yang diterapkan ketika proses audit sehingga mampu mendeteksi adanya tindakan kecurangan dan memberikan informasi mengenai tata kelola pemerintahan tersebut (Olken, 2007).

Kegiatan korupsi di tingkat pemerintah daerah dapat diketahui melalui proses audit yang dilakukan oleh lembaga audit (Liu & Lin, 2012). Kegiatan korupsi ternyata dapat diketahui karena audit mempunyai kapasitas untuk mengawasi dan mengendalikan sehingga mampu terlibat dalam semua aspek akuntabilitas pemerintah (Gong, 2009). Pemerintah melakukan peran audit untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah memiliki tujuan untuk menjadi parameter dalam menambahkan tingkat akuntabilitas dan transparansi daerah yang mampu mencegah terjadinya korupsi (Khan, 2006). Audit mampu menunjukkan adanya peluang wilayah mana yang paling mungkin terjadi tindakan korupsi.

Demi mengatur jalannya kinerja pemerintah daerah supaya lebih tertib dan transparan maka pemerintah mengeluarkan undang-undang pada tahun 2003 dengan nomor 17 yang isinya mengatur pelaksanaan kinerja dan upaya selama 1 tahun anggaran dalam LKPD. Hal-hal terkait "*fair*" atau tidaknya laporan itu dilaksanakan berdasarkan kegiatan pemeriksaan yang diatur dengan undang-undang yang dikeluarkan tahun 2004 nomor 15 dan dinyatakan dengan berbagai

opini atau pendapat. Keempat opini yang sudah biasa diketahui adalah Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat.

Ketika menjalankan pemerintahannya, pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah untuk menjalankan tata kelolanya dengan baik sehingga menghasilkan kinerja keuangan yang mampu mencegah korupsi. Semakin rendah tingkat korupsi di suatu pemerintah daerah menunjukkan pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik.

Beberapa penelitian lainnya terkait korupsi menunjukkan keterkaitan antara opini audit yang diberikan oleh BPK RI dengan korupsi, yaitu pemerintah yang mempunyai opini yang baik akan bebas dari korupsi (Rini, 2014). Penelitian Rini (2014) mendukung penelitian Khair (2015) yang mengungkapkan bahwa opini audit dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kerugian negara yang menunjukkan adanya penyimpangan. Selanjutnya Liu dan Lin (2012) juga mengungkapkan lewat penelitiannya bahwa jumlah ketidaksesuaian pendapatan dan belanja pemerintah yang dideteksi oleh institusi audit lokal akan berkaitan secara signifikan dengan tingkat korupsi.

Hasil penelitian lain menunjukkan kesimpulan yang berbeda oleh Heriningsih dan Marita (2013) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Menurut Effendy (2013) opini audit yang

diberikan oleh BPK tidak dapat dipastikan menjamin baik dan buruknya pengelolaan keuangan.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas serta permasalahan yang ada penulis memiliki alasan untuk melakukan penelitian ini karena situasi darurat yang disebabkan oleh korupsi yang dikhawatirkan akan merusak dan merugikan rakyat dan semua pihak yang terlibat. Kemudian pelaksanaan otonomi daerah yang dianggap sebagai ladang untuk melakukan tindakan yang berpeluang untuk merugikan negara. Alasan berikutnya adalah karena adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan karena berbedanya objek penelitian yang berupa pemerintah kabupaten dan kota yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya. Alasan lain mengapa penelitian ini perlu dilakukan karena masih terbatasnya penelitian yang meneliti tentang tingkat korupsi di pemerintah tingkat daerah tingkat II. Padahal pemerintah kabupaten dan kota merupakan penyelenggara pemerintahan yang rawan berpotensi munculnya kasus korupsi. Selain itu penelitian ini masih layak untuk dilakukan karena selama penelitian-penelitian sebelumnya temuan audit memberikan pengaruh positif terhadap tingkat korupsi seperti penelitian yang dilakukan oleh Liu dan Lin (2012).

Kemudian alasan penelitian ini memilih Provinsi Jawa Tengah sebagai subjek disebabkan karena Provinsi Jawa Tengah menjadi 5 besar provinsi dengan kasus korupsi terbanyak di Indonesia pada tahun 2017. Serta meningkatnya peringkat Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi kedua terkorup di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah mengalami kondisi darurat korupsi karena kasus korupsi yang terjadi di seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Jika penelitian sebelumnya menggunakan populasi pemerintah daerah tingkat provinsi maka pada penelitian ini akan lebih mengkhhususkan pada populasi pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang melatar belakangi penelitian ini menghasilkan rumusan masalah untuk menguji faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat korupsi pemerintah provinsi di Indonesia dan menjawab pertanyaan seperti berikut :

1. Apakah temuan audit oleh BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki pengaruh pada tingkat korupsi di pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah opini audit oleh BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki pengaruh pada tingkat korupsi di pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengaruh akuntabilitas dan kinerja keuangan terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi di Indonesia.

Hal tersebut secara khusus meliputi :

1. Pengaruh temuan audit oleh BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah terhadap tingkat korupsi di pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Pengaruh opini audit oleh BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah terhadap tingkat korupsi di pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah referensi penelitian dan pengembangan teori yang berhubungan dengan audit pemerintah dan tingkat korupsi.
2. Memberikan saran dan kritik kepada audit pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya sehingga mampu berperan aktif dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.
3. Menambahkan bukti empiris atas penelitian khususnya pada pengaruh akuntabilitas, kinerja keuangan terhadap tingkat korupsi pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : Telaah Pustaka

Bab kedua menguraikan mengenai teori yang mendasari penelitian ini untuk dilakukan, dalam bab ini juga terdapat pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya, kerangka penelitian, serta hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ketiga berisi bagaimana pelaksanaan penelitian akan dilakukan, dalam bab ini juga dijelaskan identifikasi variabel, definisi variabel, populasi dan sampel penelitian, sumber data dan jenis penelitian, metode pengumpulan dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : Hasil dan Analisis

Bab keempat menjelaskan deskripsi objek yang akan diteliti, analisis kuantitatif, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil dari penelitian.

BAB V : Penutup

Bab kelima adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.